

aporan

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**



Ålamat: Jl. Magelang No.41, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta Telp. (0274) 556916 | Fax. (0274) 556915













DAFTAR S



DAFTAR ISI	1
PENGANTAR	2
BAGIAN PERTAMA	
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	3
Gambran Umum Layanan Informasi Publik	3
Kebijakan Layanan Informasi Publik	7
BAGIAN KEDUA	
Permohonan Informasi Publik	8
- Sarana Permohonan Informasi Publik	11
- Jangka Waktu Pemenuhan Informasi Publik	11
- Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	12
BAGIAN KETIGA	
Kendala Internal	13
Kendala Eksternal	13
BAGIAN KEEMPAT	
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	14
BAGIAN KELIMA	
Penutup	15
CINCOP	

Lampiran Rekap Pemohon Informasi



PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya transparansi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat. Negara harus transparan, akuntabel dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik.

KPU Kota Yogyakarta sebagai salah satu badan publik punya kewajiban membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pelayanan informasi melalui PPID KPU Kota Yogyakarta dilaksanakan di kantor KPU Kota Yogyakarta, Jalan Magelang Nomor 41 Yogyakarta pada jam kerja.

KPU Kota Yogyakarta berupaya meningkatkan diri dalam memberikan layanan informasi kepada publik dengan adanya satu layanan yang terintegrasi dan terstruktur. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan KPU Kota Yogyakarta dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Kegiatan PPID KPU Kota Yogyakarta sepanjang periode 2023 kami tuangkan dalam Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Yogyakarta dengan harapan bisa memberikan gambaran secara lengkap mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Yogyakarta, 1 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum

HAKota Yogyakarta

Noor Harsya Aryosamodro





BAGIAN PERTAMA PPID KPU KOTA YOGYAKARTA



GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ditetapkan pada Tahun 2023 melalui Surat Keputusan Ketua KPU Kota Yogyakarta Nomor 174.1 tertanggal 24 November 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Yogyakarta.



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 174.1 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai lembaga publik wajib melaksanakan menyiapkan, mengelola, memberikan, menerbitkan informasi publik secara baik dan efisien;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

- tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019



KELIMA

KEENAM

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3771:
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1223);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1505);
- Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan Susunan

Personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
 - a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

KETIGA

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 e. Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi;
- e. Tim Penghubung Penyedia informasi Dan Dokumentas
- f. Petugas Desk Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.
- : Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, memiliki tugas dan wewenang :
- Menetapkan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat
 Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan
 Umum Kota Yogyakarta;
- Menentukan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Menentukan kategori informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, informasi dan dokumentasi dikuasai yang danat diakses oleh masyarakat.
- KEEMPAT : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas dan wewenang:
 - Memberikan arahan dan kebijakan umum kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta selaku Penanggungjawab dan merupakan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Memberikan arahan dan kebijakan teknis kepada Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota

Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkaitan dengan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pusat Informasi Pemilu (PIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogvakarta.

: Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, memiliki tugas dan wewenang:

 Bertanggungjawab terhadap operasional Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

- Secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berdasarkan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- Menindaklanjuti keberatan dari pemohon informasi publik yang permohonannya ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- 4. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal terdapat pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi atas rekomendasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- Memfasilitasi pelaksanaan fungsi pelayanan terhadap Pusat Informasi Pemiliu Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d memiliki tugas dan wewenang:

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta.
- Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

- Menata dan menyimpan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Menyeleksi dan menguji informasi publik, termasuk informasi publik dalam kategori informasi yang dikecualikan;
- Menyiapkan berkas-berkas alat bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KETUJUH : Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf e, memiliki tugas dan wewenang:
 - Menyiapkan bahan-bahan dan materi-materi yang diperlukan dalam pelayanan informasi kepada publik;
 - Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - Mengkoordinasikan untuk penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Petugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf f, bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta atas bantuan bahan-bahan dan materi-materi yang diperlukan kepada Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KESEMBILAN : Jadwal dan Petugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada
 Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil
 pelaksanaannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
 Yogyakarta Selaku Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan
 Dokumentasi.





KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKBETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKARTA KARTA SUL SALINAN MENINGKAN SUL SALINAN KARTA SUL SALINAN SUL SA

LAMPIRAN I

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 174.1 TAHUN 2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN			
1	Noor Harsya Aryosamodro	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi			
	Erizal	Anggota				
2	Agus Muhamad Yasin	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi			
2	Ratna Mustika Sari	Anggota				
	Zuhad Najamuddin	Anggota				
3	Srimulyani	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi			
4	Kholil Ar Rahman	Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Penyedia Informasi			
	Didik Sutrianto	Analis Penghubung Antar Lembaga	Tim Penghubung, Pengelola dan Penyedia Informasi dan Dokumentasi - Desk Pelayanan			
5	Sinta Citra Cahyani	Analis Data dan Informasi				
J	Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan				
	Lisa Kadarwati	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKBETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKBETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM Sepala Suka Jagian Hukum dan SDM

EKAWATI GUSTINA

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 174-1 TAHUN 2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMERTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

JADWAL DAN PETUGAS *DESK* PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

HARI	WAKTU	NAMA PETUGAS
Senin	07.30 - 16.00 WIB	Sinta Citra Cahyani Sriyanto
Selasa	07.30 - 16.00 WIB	Didik Sutrianto Putri Nastiti
Rabu	07.30 - 16.00 WIB	Setyawan Isharyadi Wenny Amalia
Kamis	07.30 - 16.00 WIB	Lisa Kadarwati Muh. Heri Suryono
um'at	07.30 - 16.00 WIB	Bagus Dwi Saputro Lindha Asrie Ati Muktie
	HARI Senin Selasa Rabu Kamis um'at	Senin 07.30 – 16.00 WIB delasa 07.30 – 16.00 WIB Rabu 07.30 – 16.00 WIB Samis 07.30 – 16.00 WIB

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya SEREETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MANUA JOYAKAKTA Repala Sib. Bagian Hukum dan SDM LIA EKAWATI AGUSTINA





Keluarnya keputusan tentang PPID KPU Kota Yogyakarta didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1) huruf a tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

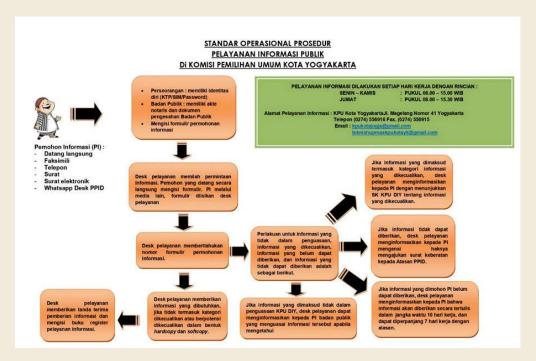
Implementasinya, KPU Kota Yogyakarta berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu serta tidak di pungut biaya. KPU Kota Yogyakarta memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui media elektronik dan non elektronik, yaitu:

- 1. Website KPU Kota Yogyakarta dengan alamat https://kota-Yogyakarta.kpu.go.id.
- 2. Surat manual
- 3. Email <u>kpukotajogja@gmail.com</u>, teknishupmaskpukotayk@gmail.com
- 4. WA PPID KPU Kota Yogyakarta dengan Nomor WA 089522996000 Telepon/Fax Kantor KPU Kota Yogyakarta di Nomor (0274) 556916 / (0274) 556915
- 5. Masyarakat juga bisa secara langsung datang ke kantor KPU Kota Yogyakarta, Jln Magelang No. 41 Tegalrejo Yogyakarta
- 6.Berbagai macam media informasi publik disediakan untuk memudahkan masyarakat mencari informasi yang diperlukan.





KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Kewajiban dari PPID KPU Kota Yogyakara untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik sebagaimana tergambar dalam SOP Pelayanan Informasi Publik di atas. Prinsip pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, efektif dan efisien menjadi tantangan bagi PPID KPU Kota Yogyakarta.

Seperti yang telah dijelaskan, untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien, PPID KPU Kota memanfaatkan media elektronik dan non elektronik. Selain itu PPID KPU Kota Yogyakarta juga mempunyai SDM yang mengelola PPID yang tertuang di SK Ketua KPU Kota Yogyakarta Nomor 174.1 sejumlah 17 orang.





BAGIAN KEDUA LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK





KPU Kota Yogyakarta sebagai salah satu badan publik wajib untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, pada dasarnya KPU Kota Yogyakarta selalu berusaha untuk memberikan pelayanan informasi agar publik dapat mengakses informasi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien.



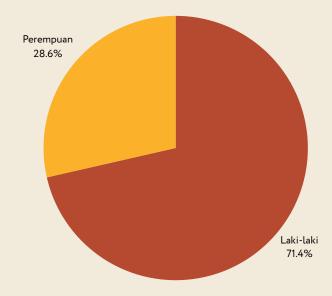
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

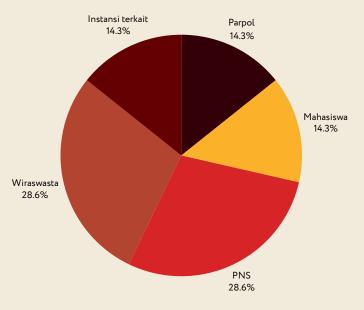




Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya. Wajar jika KPU Kota Yogyakarta sebagai salah satu badan publik mendapatkan selalu permohonan informasi, karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang, juga merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat. Selama kurun waktu 2023. PPID KPU Kota menerima Yogyakarta permohonan informasi sebanyak 7, berdasarkan klasifikasinya dapat di jelaskan sebagai berikut:

Pemohon informasi di PPID KPU Kota Yogyakarta pada tahun 2023 didasarkan pada jenis kelamin, laki-laki sejumlah 2 orang dan perempuan sejumlah 5 orang, secara prosentase kelamin laki-laki memang jenis mendominasi jumlah pemohon informasi.





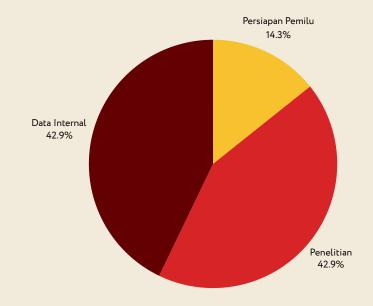


Dari total pemohon sebanyak 7 orang, dilihat dari latar belakang atau jenis pekerjaannya partai politik sejumlah 1 pemohon, Mahasiswa 1 pemohon, PNS 2 pemohon, Wiraswasta 2 pemohon dan dari instansi terkait sebanyak 1 pemohon. Dapat dilihat prosentase pemohon dari PNS dan dari Wiraswasta sama banyaknya.

Permohonan Informasi/Data Melalui PPID KPU Kota Yogyakarta Berdasarkan Tujuan Penggunaan Informasi:

Pemohon informasi ingin mendapatkan informasi untuk tujuan otentikasi parpol sebagai syarat untuk persiapan pemilu 2024 sebanyak 1 permohonan, Penyusunan Penelitian sebanyak 3 permohonan dan untuk informasi internal sebanyak 3 permohonan.

(Rekap pemohon informasi di PPID KPU Kota Yogyakarta terlampir pada laporan ini)

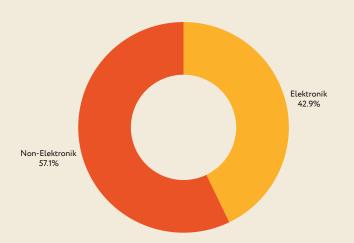






SARANA PERMOHONAN INFORMASI

Layanan permohoan informasi di KPU Kota Yogyakarta di sediakan melalui media elektronik (telepon/fax, email, WA PPID) dan non elektronik (pos surat maupun datang langsung)



Dari jumlah 7 pemohon informasi selama tahun 2023 sebanyak 3 permohonan diterima petugas melalui media elektronik dan 4 permohonan melalui media non elektronik.

JANGKA WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK

KURANG DARI 10
HARI

Semua Permohonan Informasi
Bisa Dipenuhi

Selama Tahun 2023 semua permohonan informasi publik di KPU Kota Yogyakarta dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh UU KIP. Atau dengan kata lain tidak ada informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang di tentukan.





PEMENUHAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dari 7 (tujuh) permohonan informasi publik, semuanya dikabulkan dan diberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon. Tidak ada satupun permohonan informasi yan ditolak karena semua informasi yang diminta merupakan informasi umum, bukan kategori informasi yang dikecualikan.



BAGIAN KETIGA

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KPU Kota Yogyakarta telah memberikan sarana dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi bisa melalui media elektronik dan non elektronik. Masyarakat juga bisa mengakses website resmi KPU Kota Yogyakarta. Kami menyadari bahwa dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID KPU Kota Yogyakarta.

KENDALA INTERNAL	KENDALA EKSTERNAL
 Berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) di PPID, dirasakan kurang optimal karena bersamaan dengan ketugasan di sub bagian masing-masing Sarana dan prasarana berupa: komputer yang belum berfungsi optimal karena kadang ada kerusakan No WA PPID hangus sehingga kami kehilangan banyak data PPID dari Whatsapp Ruangan PPID yang belum tertata dengan rapi 	Berasal dari pemohon informasi yang tidak membaca SOP pelayanan informasi





BAGIAN KEEMPAT REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

REKOMENDASI

PPID memiliki peran yang sangat besar dalam penyampaian informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung dan menuntut PPID melakukan tugasnya secara profesional. Oleh karena itu updating data harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi publik yang dibutuhkan.

Layanan PPID wajib didukung oleh SDM yang mampu dan terampil dalam memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM PID melalui diklat terkait dengan layanan informasi

RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendukung perbaikan PPID KPU Kota Yogyakarta, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Internalisasi tugas PPID KPU kota Yogyakarta
- Mengusulkan pelaksanaan pedidikan dan pelatihan mengenai PPID ke KPU DIY dan KID Yogyakarta
- Menata kembali sarana dan prasarana PPID KPU Kota Yogyakarta
- Melaksanakan updating data secara berkala





BAGIAN KELIMA PENUTUP

Dalam melaksanakan UU KIP, KPU Kota Yogyakarta senantiasa berusaha melaksanakan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dimasa yang akan datang, PPID KPU Kota Yogyakarta akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap permohonan informasi publik yang lebih optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Demikian laporan ini di buat untuk dapat dipegunakan sebagai evaluasi dalam hal pelayanan informasi publik sehingga bisa dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID KPU Kota Yogyakarta.







REGISTER PEMOHON INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

No	Tgl	Nama	Alamat	No Kontak	Pekerjaa n	Informasi yang diminta	Tujuan	Status Informasi	Bentuk Informasi yang dikuasai	Jenis Pemoho n	Pemberi Informasi
1	27/07/2023	Yudhi Kurniawan	Jl Suroharjo Mujamuju YK	088212353415	Wiraswasta/ Partai Politik (PKB)	> DPT Rekap	Data Internal	Dibawah Penguasaan	Email	Mendapat kan Salinan	Petugas PPID
2	01/08/2023	Anisya Ratna Komalasari	Gang Madusari 47, Caturtungga l, Depok, Sleman	082261318381	Peneliti	> Persentase Partisipasi Pemilih > Jumlah TPS 2019 dan 2024 > Kasus Gugatan Keberatan Hasil Pemilu (jika ada)	Penelitian Kerawanan Sosial Pemilu di Kota Yogyakarta	Dibawah Penguasaan	Email	Mendapat kan Salinan	Petugas PPID
3	21/08/2023	Munazar	Jl Gondosuli GK IV No 155 Baciro Yogyakarta	08216000998 1	Wiraswasta	>Data c1 TPS 2019	Analisis Bahan Kajian	Dibawah Penguasaan	Email	Mendapat kan Salinan	Petugas PPID
4	22/08/2023	Muhamma d Aqimudin	iroyudan RT04 Guwosari, Pajangan, Bantul	08523009055 3	Karyawan Swasta	>Data TPS PerKelurahan	Membuat Aplikasi Google Form	Dibawah Penguasaan	Diambil langsung	Mendapat kan Salinan	Petugas PPID
5	12/10/2023	Bangun Damich Ardni	Rejowinang un KG	081231170223	POLRI	> Daftar Nama PPS Se Kota Yogyakarta > Daftar Alamat > Daftar No Kontak	Pembuata n panel data politik	Dibawah Penguasaan	Diambil langsung	Mendapat kan Salinan	Petugas PPID
6	14/11/2023	Ratnawati	Ndalem KG III/906 RT45 RW10 Purbayan Kotagede Yogyakarta	08213383872 0	Staff Anggota DPRD Prov. Komisi D	> Softcopy DPT Kota > Softcopy Lokasi TPS > Softcopy Specimen Lembar Suara 2024 > Softcopy Perolehan Suara Caleg 2019	Pedoman	Dibawah Penguasaan	Diambil langsung	Mendapat kan Salinan	Petugas PPID



REGISTER PEMOHON INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

\ \	Ю	Tgl	Nama	Alamat	No Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tuiuan	Status Informasi	Bentuk Informasi yang dikuasai	Jenis Pemohon	Pemberi Informasi
7		17/17/70731	Cahyo	SAT RESKRIM POLRESTA YOGYAKARTA	081326607956		>DCT dan Tim Kampanye		Dibawah Penguasaan	Diambil langsung	Mendapatk an Salinan	Petugas PPID